

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RPJMD Tahun 2017 – 2022 menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas atau unggulan. Sektor pariwisata saat ini dijadikan sebagai sektor penggerak perekonomian daerah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan otomatis meningkat juga pendapatan dan perekonomian masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 564.306 wisatawan dengan rincian sebagai berikut Tahun 2017 Wisatawan Nusantara sebanyak 359.901 Wisnus dan Wisatawan Mancanegara sebanyak 7.183 Wisman sedangkan pada akhir masa Renstra 2022 kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 553.752 wisnus dan 10.554 wisman.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi prioritas nasional sehingga Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan dan membangun infrastruktur dan sarana prasarana di destinasi pariwisata.

Kunjungan wisatawan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan secara keseluruhan, seperti berikut wisatawan nusantara Tahun 2016 sebanyak 342.513 wisnus sedangkan pada tahun 2017 menjadi 359.901 wisnus dan untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2016 sebanyak 5.106 wisman sedangkan pada tahun 2017 sebanyak

7.183 wisman. Untuk kunjungan wisatawan pada saat low sesion terjadi pada saat bulan menjelang bulan ramadhan sedangkan peak sesion terjadi bulan april dan oktober.

Bangka Belitung merupakan salah satu destinasi prioritas nasional dimana potensi yang dimiliki baik alam, buatan dan budaya sangat beragam dan tidak ternilai. Posisi wilayah yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan karena Bangka Belitung merupakan wilayah yang dilewati jalur perdagangan internasional seperti ALKI I sehingga memberikan suatu kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 20.. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun, luas wilayah darat

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencanangkan pembangunan sektor kepariwisataan dan pelestarian kebudayaan alam sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka penetapan kawasan objek wisata dan pelestarian budaya yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Jenis – jenis wisata yang akan dikembangkan di Bangka Belitung sangat beragam diantaranya :

- a. Wisata bahari
- b. Wisata budaya
- c. Wisata alam
- d. Wisata olahraga / minat khusus
- e. Wisata kuliner
- f. Wisata sejarah

Yang merupakan wisata yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh semua pihak dan masyarakat. Pariwisata tidak hanya mengandalkan wisata alam dan buatan saja tetapi harus juga melibatkan wisata budaya sebagai salah satu faktor pendorong utama karena budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata.

Pelestarian budaya wajib untuk dilindungi baik perlindungan internal maupun eksternal. Adat istiadat harus dilestarikan sehingga karakteristik suatu kawasan wisata dapat diperkuat. Dalam budaya terdiri dari seni dan adat istiadat yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan karena budaya merupakan karakteristik suatu wilayah sehingga harus dijaga keasliannya.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Yang mana Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Dan dapat kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Perencanaan secara umum juga dapat diartikan sebagai usaha menentukan cara terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelibatan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan merupakan unsur utama dalam perencanaan partisipatif. Dimana pengertian perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif terhadap suatu kegiatan tertentu, tentang bagaimana mengelola sumber daya yang ada dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. pembangunan merupakan suatu fungsi utama dari manajemen pembangunan yang mutlak diperlukan mengingat kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan, juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih baik diperlukan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kapasitas intelektual, manajerial dan profesional sehingga membantu terwujudnya pelayanan prima. Aparatur yang ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan, akan mempercepat perubahan ke arah lebih baik yang kita inginkan. Ketepatan penempatan, pelatihan, mutasi dan rotasi pegawai yang lebih mengarah kepada kompetensi, juga akan mendorong akselerasi organisasi ke arah yang lebih maju.

Isu perubahan iklim, krisis ekonomi dunia, dan tumbuhnya gelombang ekonomi kreatif telah menyebabkan perubahan sikap dan tuntutan atas produk-produk wisata yang dihasilkan dari semula bersifat produk wisata massal yang tidak ramah lingkungan dan komunitas, menjadi kearah bentuk pembangunan produk wisata yang lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan dan memberikan apresiasi tinggi pada komunitas dan destinasi yang bersangkutan (*responsible tourism*) misalnya wisata budaya, wisata bahari, dan wisata kreatif serta peningkatan industri pariwisata yang berdaya saing. Isu-isu global dan nasional tersebut diatas telah menyebabkan perlunya pengembangan manajemen destinasi yang mampu mengantisipasi tuntutan kedepan.

Sebuah destinasi harus dapat berkembang secara dinamis dan belajar dari kebutuhan yang diperlukan secara cepat melalui perkuatan manajemen internal (*learning destination*). Cara-cara pengelolaan destinasi dengan pendekatan lama yang tidak memperkuat peran serta masyarakat akan tidak mampu menyikapi perubahan yang cepat ini.

Disamping harus berbasis pada masyarakat, pengelolaan dan pengorganisasian sebuah destinasi harus pula mampu merengkuh kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan, kepuasan komunitas lokal, dan promosi sebagaimana konsep pengembangan manajemen destinasi (*DMO, Destination Management Organization*) termasuk untuk pengembangan desa wisata yang mengarah kepada tumbuh kembangnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata.

Perubahan paradigma ekonomi dan pariwisata dunia tersebut telah merubah pula kebutuhan akan produk wisata dari semula bersifat massal (*mass tourism*) yang lebih mengandalkan jumlah, menjadi bersifat penampilan budaya lokal (*cultural tourism*) yang lebih mengandalkan pengenalan budaya bersifat pasif, dan kemudian menjadi bentuk produk wisata berbasis kreativitas (*creative tourism*) yang lebih mengedepankan pengenalan dan pengembangan budaya lokal bersifat interaktif berbasis pada sentuhan kemanusiaan (*human touch*). Wisata budaya berbasis pada warisan budaya sebagai potensi utama pariwisata nasional telah berkembang luas tidak hanya pada obyek namun juga pada kawasan baik di perkotaan (kota pusaka) yang bahkan telah di inisiasi oleh pemerintah daerah (Jaringan Kota Pusaka), maupun di pedesaan.

Bidang pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisatabahari, agrowisata, maupun wisata budaya. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi obyek daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih menghadapi kendala dan tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Pengembangan kepariwisataan Bangka Belitung tidak terlepas dari munculnya berbagai isu strategis pembangunan dimana dalam pembangunannya terdapat ketimpangan dalam pembangunan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, optimalisasi kinerja pemerintah daerah, lemahnya sinergitas antar unit kerja, pelibatan masyarakat, maupun pengembangan sumber daya manusia merupakan beberapa isu khusus yang

juga berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Dan selanjutnya untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan komitmen politik kepala daerah, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD yang berdurasi 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung tercapainya RPJMD tersebut. Sebagaimana RPJMD, dalam Renstra PD juga memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran teknis dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
20. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
22. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

23. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 36 Seri E);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);

1.3 TUJUAN

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 – 2022 disusun agar dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan industri pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa fisik maupun non fisik. Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017- 2022 menggambarkan pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Kesamaan persepsi dan kesamaan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan dan diharapkan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kurun 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2022 untuk menciptakan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2017-2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Setiap instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II mempunyai rencana strategis tentang program – program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Rencana strategis dimaksud harus mencakup :

- a. Uraian tentang strategi dan faktor – faktor kunci keberhasilan organisasi;

- b. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;
- c. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 terdiri dari :

BAB I. : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggambarkan latar belakang penyusunan Renstra dan alur proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan peraturan perundangn yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II: GAMBARAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta kondisi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala OPD.

Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber dayamanusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yang merupakan Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan pengarahannya terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan standar pelayanan minimal serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana;
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan;
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Menjelaskan ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Umum;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3. Seksi Kesenian.
- d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Kawasan Strategis Pariwisata;
 - 3. Seksi Destinasi Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Analisis Pasar Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
- f. Bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sumber Daya Pariwisata;
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif;
 - 3. Seksi Kelembagaan Kepariwisataan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dideskripsikan sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan

bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Dan Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - 1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - 2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - 3. penyelenggaraan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - 5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
 - 6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - 8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Bidang Sekretariat

- a. Bidang Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang.
- b. Bidang Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :
 - 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - 2. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Dalam pelaksanaan Bidang Kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunanrumusan kebijakan cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian tradisional;
 2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian tradisional;
 3. penyelenggaraan dan pengoordinasianbahan penyiapan pelaksanaan tugas pembantuan perfilman nasional, warisan budaya, dan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa;
 4. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporancagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan kesenian tradisional serta tugas pembantuan;
 5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 7. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata.
- b. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 2. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 3. penyelenggaraan penyiapan bahanpelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
 4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata.
- b. Dalam menjalankan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata memiliki fungsi, yaitu :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan analisis pasar pariwisata, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;

2. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknisanalisis pasar pariwisata, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;
3. penyelenggaraan penyiapan bahanpelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis analisis pasar pariwisata, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;
4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6 Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata

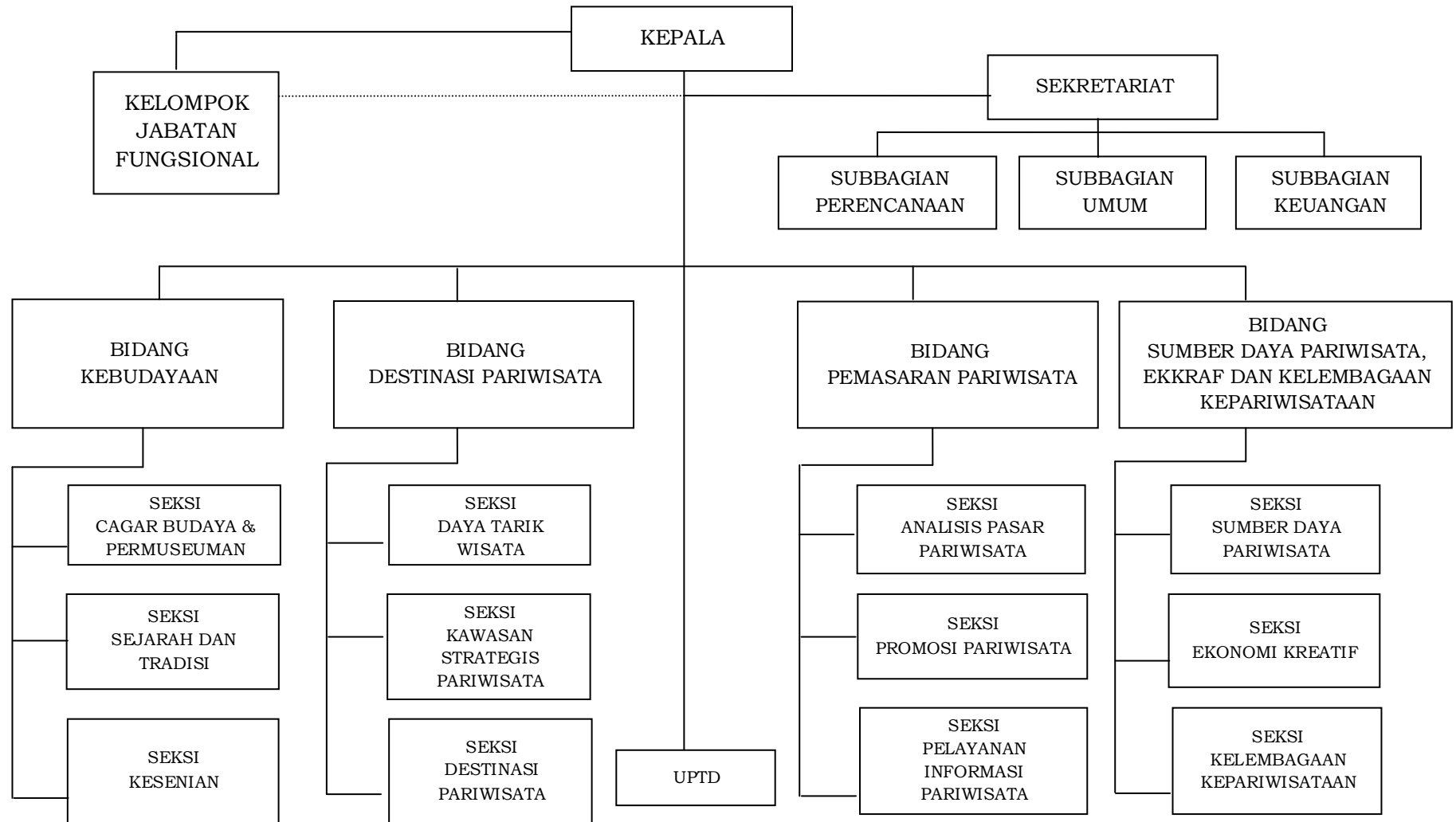
- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataaan.
- b. Bidang Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataaan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi, yaitu :
 1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataaan;
 2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataaan;
 3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataaan;
 4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam menjalankan roda pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional karena jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia sejumlah 68 orang terdiri dari 58 Pegawai Negeri Sipil dan 14 Tenaga Kontrak Kerja/Honorar, adapun rincian jumlah pegawai negeri sipil dan honorar dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang dan Eselonisasi
di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017

Golongan / Ruang	Eselon			Non Eselon		Jumlah
	II	III	IV	Fungsional	Staf	
Golongan IV/d	1	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	3	-	-	-	3
Golongan IV/a	-	2	-	-	-	2
Jumlah Golongan IV	1	5	-	-	-	6
Golongan III/d	-	-	11	-	1	12
Golongan III/c	-	-	4	1	2	7
Golongan III/b	-	-	-	3	11	14
Golongan III/a	-	-	-	-	11	11
Jumlah Golongan III	-	-	15	4	24	44
Golongan II/d	-	-	-	-	2	2
Golongan II/c	-	-	-	1	3	4
Golongan II/b	-	-	-	-	2	2
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan II	-	-	-	1	7	8
Jumlah Pegawai	1	5	15	5	31	58
Jumlah PHL	-	-	-	-	14	14

sumber : sub bagian umum disbudpar

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017

Pendidikan	Eselon			Non Eselon		Jumlah
	II	III	IV	Fungsional	Staf	
Doktoral /S-3	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana /S-2	-	1	9	1	3	14
Sarjana / S-1	1	4	6	3	14	28
Diploma /D-IV	-	-	-	-	2	2
Diploma /D-III	-	-	-	1	9	10
Diploma /D-II	-	-	-	-	-	-
Diploma / D-I	-	-	-	-	-	-
SMA	-	-	-	-	4	4
Total	1	5	15	5	32	58

sumber : sub bagian umum disbudpar

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3.1 Gambaran Kinerja Pelayanan Urusan Dinas

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 2 (dua) urusan Pemerintahan :

1. **URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN)**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi

masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

2. **URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN)**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaansarana wisata dan obyek wisata.

Target indikator sasaran RPJMD 2017-2022 untuk Urusan Pariwisata adalah pertumbuhan tingkat kunjungan wisatawan, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

Realisasi pencapaian target selama lima tahun periode RPJMD termaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DISBUDPAR 2012-2016

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKU					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
A.	Urusan Kebudayaan						
	Warisan Budaya Tak Benda	NA	5 WBTB	7 WBTB	17 WBTB	12 WBTB	
	Warisan Budaya Benda	NA	NA	NA	NA	NA	
B	Urusan Pariwisata						
	Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.313	5.738	6.197	6.693	7.228	
	Tingkat Kunjungan Wisatawan Nusantara	431.558	470.398	512.734	558.880	609.179	

sumber :

1. bidang pengembangan pemasaran pariwisata
2. bidang kebudayaan

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Wisnus dan Wisman, antara lain :

- 1) Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, *website* (*bandungtourism.com*), dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata;
- 2) Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, Asosiasi Profesi, dan lain sebagainya);
- 3) Upaya lain yang telah dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pengelola Bandara (PT. Angkas Pura II), dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan RI.

Bila dilihat dari tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus lebih mengoptimalkan pelestarian budaya lokal dimana sampai dengan saat ini data yang dimiliki bidang kebudayaan belum terupdate berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan data tersebut diperlukan peran serta pemangku kepentingan dalam melestarikan budaya lokal Bangka Belitung. Selain itu terkait dengan penetapan indikator kinerja pelayanan yang ada, permasalahan yang muncul adalah ketika indikator kinerja yang disusun pada Renstra periode sebelumnya tidak mengacu indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut, yaitu:

- a) Indikator kinerja SPM;
- b) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggara suatu urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
- c) Indikator yang telah dikembangkan secara mandiri berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi PD.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung adalah kinerja

pelayanan Perangkat Daerah sulit untuk diukur karena tidak jelas dan sangat terbatasnya skup indicator kinerja, juga permasalahan kurangnya keserasian, keterpaduan, sinkronisasidan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra K/L, Renstra PD Provinsi dan Renstra PD Kabupaten/Kota.

Dan faktor lainnya pada PD Provinsi, banyak capaian yang tidak dapat diukur sehingga berdampak terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi KepalaDaerah.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) DISBUDPAR 2012-2016

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI IKU					KET
		2012	2013	2014	2015	2016	
A.	Urusan Kebudayaan						
	Warisan Budaya Tak Benda	NA	2 WBTB	5 WBTB	7 WBTB	7 WBTB	
	Warisan Budaya Benda	NA	NA	NA	NA	NA	
B	Urusan Pariwisata						
	Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara	5.540	3.866	3.702	7.620	5.106	
	Tingkat Kunjungan Wisatawan Nusantara	364.962	376.593	510.367	541.421	342.513	
		370.502	380.459	514.069	549.041	347.619	

2.3.2 Gambaran Kinerja Keuangan Dinas

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 20.571.252.500,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.579.622.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.991.630.500,- Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan pagu dana sebesar Rp. 22.127.965.959,- yang terdiri dari Rp. 6.444.143.859,- (29,12%) merupakan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Rp. 15.683.822.100,- (70,88%) adalah Belanja Langsung (BL).

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja, dapat dilihat dalam tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 – 2017

Tahun	Total Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu (Rp)		Realisasi (Rp)	
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2016	20.571.252.500	13.991.630.500	6.579.622.000	11.040.042.372	6.218.758.350
2017	22.127.965.959	15.683.822.100	6.444.143.859	11.694.288.182	6.199.487.528

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disbudpar

Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Pentas Seni Tari dan Musik (Kali)				NA	NA	NA	35 pts	122 pts	NA	NA	NA	35	100					
2	Promosi Pariwisata melalui expo nasional (kali)				NA	NA	NA	6 event	4 event	NA	NA	NA	6	4					
3	Pengembangan objek wisata (paket)				NA	NA	NA	1 Kaw	1 Kaw	NA	NA	NA	0	0					
4	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (org)				5.738	6.197	6.693	7.228	5.514	3.866	3.702	7.620	5.106	7.183					
5	Daerah tujuan wisata (nomor)				NA	NA	NA	NA	27 DTW	NA	NA	NA	0	0					
6	Sosialisasi sadar wisata				NA	NA	NA	7	7	NA	NA	NA	6	4					
7	Masa tinggal (length of stay)				NA	NA	NA	3	3	NA	NA	NA	2	2					
8	Jumlah hotel dan penginapan				NA	NA	NA	350	350	NA	NA	NA	310	310					
9	Jumlah kamar hotel dan penginapan				NA	NA	NA	4500	5000	NA	NA	NA	4500	4658					
10	Jumlah event nasional di Provinsi				NA	NA	NA	4	4	NA	NA	NA	-	2					
11	Jumlah Event internasional di Provinsi				NA	NA	NA	2	2	NA	NA	NA	-	2					

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2012 – 2017

No	Program / Kegiatan/Uraian	Anggaran Tahun 2012 – 2016 (dln Jutaan)					Realisasi Tahun Anggaran 2012 – 2016 (dln Jutaan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2012 – 2016 (dln Jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012 2	2013 3	2014 4	2015 5	2016 6
	BELANJA DAERAH															
	BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai	5.916.889	6.642.990	5.407.978	6.280.626	7.591.692	5.405.185	6.089.329	5.154.852	5.993.714	7.108.348					
	BELANJA LANGSUNG															
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Belanja Barang dan Jasa	9.004.766	11.832.081	10.283.733	18.078.986	12.366.560	7.227.793	9.287.267	8.000.628	12.851.229	9559.595					
	Belanja Modal	1.313.773	538.767	731.540	608.952	613.000	1.121.111	446.435	361.865	568.373	590.856					

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disbudpar

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sepanjang periode 2012-2016 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada Urusan Kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Provinsi. Pembangunan kesenian dan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun Tantangan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
2. Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
3. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya / benda pusaka.
4. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
5. Kurangnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

Sedangkan peluang pada urusan Kebudayaan

1. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan berkesinambungan.
2. Banyaknya pelaku seni dan komunitas senibudaya.
3. Banyaknya kreator dan apresiator Seni dan Budaya.
4. Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang harus dilestarikan.
5. Banyaknya seniman dan budayawan yang berprestasi baik di tingkat regional dan nasional.
5. Tersedianya tempat pertunjukan/pagelaran seni budaya.

Berdasarkan urusan Pariwisata maka terdapat tantangan yaitu :

- 1) Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;
- 2) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras, fasilitas umum dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi, parkir, toilet, mushola, penerangan umum dsb);
- 3) Belum maksimalnya pengembangan bandara internasional baru yang kapabilitasnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan services;
- 4) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat;
- 5) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
- 6) Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata;
- 7) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
- 8) Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
- 9) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.

- 10) Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas Sumber Daya Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif maupun kelembagaan kepariwisataan;
- 11) Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata di Daya Tarik Wisata dan penunjang kepariwisataan lainnya;
- 12) Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
- 13) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan;
- 14) Belum optimalnya hubungan kemitraan dunia pendidikan dengan stakeholder pariwisata.

Sedangkan melihat tantangan diatas, maka dapat dilihat peluang dalam urusan pariwisata sebagai berikut :

1. Kondisi aksesibilitas menuju daya tarik wisata yang semakin baik;
2. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk-produk semakin meningkat;
3. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
4. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
5. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
6. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
7. Banyaknya event-event pariwisata.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Pembangunan kepariwisataan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia, diharapkan jumlah wisatawan yang datang ke Bangka Belitung semakin meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung merupakan salah satu pendorong kegiatan perekonomian masyarakat Bangka Belitung.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan tantangan dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan datang ke Bangka Belitung, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang – bidang tugas, antara lain :

1. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;
 - b) Rendahnya kualitas jaringan aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata;
 - c) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi dsb);
 - d) Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, mushola, penerangan umum, dll);
 - e) Belum optimalnya pengembangan dan penataan bandara internasional baru yang kapabelitasnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan services;

- f) Rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholders swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata;
- g) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat.

2. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata:

- a) Rendahnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri;
- b) Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
- c) Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama bagi seluruh stakeholder pariwisata;
- d) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
- e) Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
- f) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.

3. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Pariwisata

- a) Masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas Sumber Daya Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif maupun kelembagaan kepariwisataan;
- b) Belum memadainya profesionalitas/kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata di Daya Tarik Wisata dan penunjang kepariwisataan lainnya;
- c) Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata;
- d) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan;
- e) Belum optimalnya hubungan kemitraan dunia pendidikan dengan stakeholder pariwisata.

4. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan

- a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
- b) Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
- c) Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya / benda pusaka.
- d) Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
- e) Kurangnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

Pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani melalui budaya daerah/nasional serta penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pariwisata di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek Kajian	Capaian / kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
ASPEK PELAYANAN PERANGKAT DAERAH					
Aspek Sumber Daya Manusia (tugas dan fungsi aparatur)	Masih terbatasnya Kompetensi SDM Disbudpar dalam melaksanakan tugas fungsi dan pelayanan publik	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Perda No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pergub No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan tugas dan fungsi • Kurang meratanya kemampuan dan keahlian pegawai 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin dan tanggung jawab pegawai yang masih rendah • Pendelegasian tugas dan wewenang tidak sesuai dengan bidang tugas.
Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang – bidang dalam melaksanakan tugas belum didukung oleh SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata • UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya • Pergub No. 58 Tahun 2016 	Kebutuhan dan kualifikasi SDM belum terpenuhi	Formasi kebutuhan SDM belum difasilitasi OPD terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan fungsi PD harus mengacu kepada lebih

	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan pariwisata 				<p>dari 1 K/L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih tugas dan fungsi dengan Perangkat Daerah lainnya • Pelayanan yang belum optimal • Kurangnya koordinasi antar stakeholder pariwisata dan kebudayaan
Aspek Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memenuhi standar prioritas dalam pengalokasian anggaran • Seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga menghambat penyerapan anggaran • Lambatnya pertanggungjawaban keuangan sehingga mempersulit pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Pergub No. 58 Tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis akrual dan kinerja • Kurangnya Kompetensi SDM • Proses pengajuan pertanggungjawaban kegiatan yang lambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Prosedur perencanaan yang rumit • Seringnya terjadi perubahan kebijakan/peraturan keuangan • Kurangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tercapainya indikator sasaran dan target pada program / kegiatan di PD • Tidak tepatnya waktu pencapaian target kinerja PD • Pelayanan tidak optimal karena

				pemahaman pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa	lambatnya pertanggungjawaban kegiatan
Aspek Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan gedung kantor dalam memberikan pelayanan publik • Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik 	Permenpan No 20/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal dan tersedianya kebutuhan ruang dan bangunan yang memadai • Belum terpenuhinya sarpras pendukung pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi APBD yang terbatas. • Regulasi penetapan status gedung kantor yang masih belum kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan. • Terhambatnya pelaksanaan administrasi sehingga pelayanan tidak optimal.
ASPEK KAJIAN TERHADAP RENSTRA SKPD KAB/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya antara Program dan Kegiatan yang ada di Provinsi dengan Kab/Kota sehingga belum sinerginya Renstra Kab/Kotadengan dengan Renstra Provinsi • Masih adanya Renstra Kab/kota tidak/belum disusunmengacu kepada RenstraProvinsi dan K/L 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25/2004 • UU No. 23 Tahun 2014 • Permendagri No. 54/2010 • Permendagri No. 13/2006 dan perubahannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM 	Koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya fungsi PD provinsi sebagai koordinator dan perwakilan pemerintah pusat. • Rencana pembangunan tidak sinergi dan tidak
ASPEK KAJIAN TERHADAP RENSTRA	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya antara Program dan Kegiatan yang ada di Provinsi dengan K/L sehingga belum sinerginya 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25/2004 • UU No. 23 Tahun 2014 • Permendagri No. 54/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM 	Kebijakan dan Koordinasi Pemerintah Pusat dengan	

K/L	<p>Renstra K/L dengan dengan Renstra Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam Struktur Organisasi PD Provinsi masih terdapat uraian tugas yang belum sesuai dengan Struktur Organisasi K/L sehingga sinkronisasi Program / Kegiatan mengalami kesulitan. 	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 13/2006 dan perubahannya 		Provinsi	<p>berkelanjutan karena faktor ego daerah dan egosektoral</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih sulitnya mencapai target dan sasaran pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan
ASPEK KAJIAN TERHADAP RTRW	<p>Masih banyaknya aktifitas perekonomian seperti penambangan timah konvensional, perkebunan sawit baik yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat tidak berpedoman kepada RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota sehingga menyebabkan banyaknya daya tarik wisata yang rusak pada destinasi pariwisata maupun cagar budaya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU 23/2014 UU No 10/2009 tentang Kepariwisata UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya PP 50/2011 tentang Ripparnas PP 38/2007 Perda No tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perda N0 7 Tahun 2016 tentang Ripparprov 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi SDM Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah 	Kewenangan Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya Data Tarik Wisata yang rusak Menurunnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata
ASPEK KAJIAN TERHADAP KLHS	<p>Banyak daya tarik wisata yang rusak akibat aktifitas penambangan dan pertanian/perkebunan hal</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU 23/2014 UU No 10/2009 tentang Kepariwisata 			

	tersebut dikarenakan belum optimalnya penerapan regulasi tentang kebijakan pemanfaatan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya • PP 50/2011 tentang Ripparnas • PP 38/2007 • Perda No tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Perda NO 7 Tahun 2016 tentang Ripparprov 			
--	--	---	--	--	--

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam menjalankan tugas, seorang Kepala Daerah memiliki visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan yang disusun dan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022. Adapun Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi

juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dankondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 ditetapkan dalam 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adapun Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022 adalah :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>				
No	Misi dan Program / Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan berdasarkan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-1 Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah; Program/Sasaran : Pengembangan Pariwisata Daerah	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata; 2. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan 3. Kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder pariwisata	- Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Pariwisata - Masih terbatasnya jumlah lembaga pariwisata - Masih lemahnya koordinasi dan sinergisitas kerjasama dan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata, lembaga pariwisata dan koordinasi pemangku kepentingan pariwisata
		1. Masih kurang dan rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas sarana prasarana dan fasilitas umum penunjang pariwisata 2. Rendahnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholders swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata	- Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum di Daya Tarik Wisata - Masih rendahnya kesadaran dan komitmen Pelaku Wisata dan Masyarakat	- Potensi daya tarik wisata yang beragam dan potensial - Ditetapkan Bangka Belitung dalam PP No.50/2011 sebagai Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata 2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media 	Masih kurangnya pemasaran pariwisata baik keluar negeri maupun dalam negeri	Potensi daya tarik wisata yang beragam dan potensial
--	--	---	---	--

3.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam pelaksanaan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat tujuan dan sasaran dalam upaya mendukung misi tersebut, adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Misi I : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

Tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Meningkatkan Daya saing Daerah Unggul dalam Inovasi Agrobahari
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

Sasaran:

1. Penurunan Tingkat Pengangguran
2. Penurunan Tingkat kemiskinan
3. Menekan Laju Inflasi
4. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk
5. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
6. Perwujudan kemandirian energi dan mendorong penciptaan energi baru terbarukan
7. Peningkatan pembangunan berbasis industri
8. Peningkatan Produksi dan nilai tambah sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan
10. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perkebunan
11. Peningkatan Pengembangan Pembangunan Pariwisata.

3.3. Telaah Renstra K/L dengan Renstra Provinsi

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota; dan
2. apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra PD provinsi melebihi sasaran Renstra K/L, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja PD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan PD yang akan ditangani pada Renstra PD provinsi periode berikutnya. Jika Renstra K/L rencana tahunan telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra PD kabupaten/kota;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik factor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disbudpar	Faktor	
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan		Penghambat	Pendorong
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya museum provinsi • Banyaknya cagar budaya yang terancam rusak • Belum optimalnya database cagar budaya • Belum ditetapkannya cagar budaya di provinsi/kab/kota menyebabkan sulitnya upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi anggaran • Belum adanya regulasi daerah tentang pelestarian cagar budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya taman budaya dan pasar seni. • Masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal. • Masih terbatasnya ruang pertunjukkan film. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kreatifitas pelaku seni 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak terdapat adatistiadat, tradisi dan kearifan lokal
	Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran lembaga kepercayaan di dalam masyarakat dalam penguatan ketahanan budaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya penganut kepercayaan yang tidak menempatkan diri pada lembaga kepercayaan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Tim PAKEM (pengawasan aliran Kepercayaan masyarakat)
	Program Sejarah Dan Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya informasi dan publikasi terhadap nilai-nilai kesejarahan dan pemanfaatannya dalam 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	

		<p>pengembangan ketahanan budaya dan pembangunan jatidiri dan karakter bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya media dan ruang apresiasi dalam mendukung peningkatan apresiasi nilai-nilai sejarah dan budaya nasional. 		
	Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kerjasama dengan para pelaku seni budaya dalam rangka mempromosikan kebudayaan daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masih terbatasnya kerjasama antara pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dalam pengembangan kebudayaan daerah. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Adanya dukungan moril dari pelaku seni budaya, akademisi dan masyarakat.
	Program Pelestarian Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya museum provinsi Banyaknya cagar budaya yang terancam rusak dan kurang terpelihara Belum optimalnya pemanfaatan database cagar budaya Masih kurangnya pertunjukan seni dan budaya daerah Masih terbatasnya media dan ruang apresiasi seni dan budaya Masih kurangnya lembaga seni dan budaya daerah 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Besarnya minat dan keinginan pelaku seni dan budaya serta adat istiadat yang dilestarikan
	Misi 2: Memperluas keterjangkauan layanan	-	-	-

	pendidikan			
	Misi 3: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan	-	-	-
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kondisi museum serta kualitas pengelolaan dan penyajian museum. Masih terbatasnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap museum dan koleksinya. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Dukungan dana APBDkab/kota dan swasta.
	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional. Masih rendahnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap film-film yang bertemakan pendidikan dan film lokal Arus globalisasi dan menguatnya pengaruh budaya pop luar negeri terhadap apresiasi masyarakat terhadap kesenian. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi.
	Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran dan toleransi akan keberagaman budaya dan kepercayaan. Terbatasnya dukungan dana APBD provinsi maupun APBN Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya solidaritas dan sportivitas dan kegotongroyongan dikalangan masyarakat. • Masih terbatasnya pengetahuan mengenai pengetahuan tradisional dan folklor. 		
	Program Sejarah Dan Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya. • Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi lokal. • Masih terbatasnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya nasional. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Masih banyaknya kantong dan komunitas budaya yang tetap mempertahankan adat istiadat dan tradisi.
	Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pemahaman dan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. • Rendahnya kuantitas dan kualitas diplomasi dan hubungan kerjasama dibidang kebudayaan. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	-
	Misi 4 : Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan			
	Misi 5 : Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan layanan pendidikan			
	Misi 6: Melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia			
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya usaha pendokumentasian cagar 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	-

		budaya. <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM untuk dokumentasi cagar budaya. • Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan permuseuman baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. 		
	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya database kesenian tradisional. • Masih terbatasnya perlindungan terhadap kesenian tradisional. • Terbatasnya SDM dibidang perfilman. • Terbatasnya database perfilman. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	-
	Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi	Masih terbatasnya penggalian dan kajian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	-
	Program Sejarah Dan Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya kajian sejarah dan nilai budaya daerah. • Masih rendahnya internalisasi sejarah dan nilai budaya. 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	-
	Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Masih terbatasnya SDM kebudayaan dibidang diplomasi budaya.	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	-
	Program Pelestarian Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pendokumentasian cagar budaya daerah • Masih terbatasnya database kesenian tradisional • Masih kurangnya kajian seni tradisi, sejarah dan nilai budaya • Masih kurangnya pertunjukan seni dan budaya daerah 	Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN	Besarnya minat dan keinginan pelaku seni dan budaya serta adat istiadat yang dilestarikan

		<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya lembaga seni, adat dan budaya daerah 		
	Kementerian Pariwisata Misi 1: Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah			
	T1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia			
	S1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional	-	Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB tidak dijadikan indikator capaian kinerja Perangkat Daerah	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022
	S2. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional	Belum terbangunnya data ketenagakerjaan sektor pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid	Kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja disektor pariwisata tidak dijadikan indikator capaian kinerja Perangkat Daerah	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022
	S3. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	Belum terbangunnya data investasi pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid	Investasi sektor pariwisata belum dijadikan indikator capaian kinerja perangkat daerah	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022
	S4. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia	data primer sulit diperoleh	Belum optimalnya pengembangan bandara internasional H.AS Hanandjoeddin	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022
	S5. Meningkatnya kuantitas wisman ke Indonesia dan wisnus	<ul style="list-style-type: none"> masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya koordinasi antar daerah Terbatasnya anggaran dalam rangka pemasaran / promosi pariwisata Masih adanya ego sektoral daerah 	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022
	T2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia			
	S6. Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia	Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acilliary dan atraksi pariwisata di daerah	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata 	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022

	S7. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah • Belum adanya bidang destinasi dalam struktur organisasi SKPD Budpar 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata • Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata • Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata 	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022
	S8. Terciptanya pemasaran dan promosi pariwisata yang berkualitas dan bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa pasar belum terbentuk sehingga promosi belum dilakukan fokus pada pangsa pasar • Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata • Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata 	Sektor pariwisata menjadiprioritas dalam RPJMD 2017-2022

3.4 Telaah Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten / Kota

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pariwisata sebagai acuan untuk bidang pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arah rencana strategis pengembangan pariwisata Indonesia secara umum berusaha untuk melakukan penguatan dan diverifikasi pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia dengan harapan hal ini mampu mewujudkan produk unggulan pariwisata di masing-masing daerah. Cara untuk mewujudkan arah pembangunan strategis itu dilakukan dengan mendorong seluruh warga masyarakat Indonesia untuk turut andil dalam menciptakan ekonomi kreatif yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon baru pariwisata Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelaahan atas rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang membawahi urusan budaya, berfokus pada pelestarian terhadap kebudayaan Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan sistem informasi kebudayaan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelestarian budaya, penyediaan dana serta penguatan tata kelola yang artinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolanya.

Sedangkan rencana strategis pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan oleh provinsi, berfokus pada pelestarian kebudayaan dan kesenian menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengembangan bidang pariwisata. Karena seharusnya kebudayaan dan kesenian ini mampu menjadi aset yang akan memberikan keuntungan dalam pengembangan pariwisata serta lebih meningkatkan cara-cara promosi kebudayaan dan pariwisata yang kreatif baik media maupun sumber daya manusia pelaksananya.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten / Kota

No	Tujuan Renstra Kab/Kota	Sasaran Renstra Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Disbudpar	Faktor Penghambat
1.	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang			
	Misi 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta pemanfaatan sarana dan prasarana kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga untuk mendukung investasi.			
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah 		
	Misi 2 : Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang pariwisata dalam mengembangkan produk-produk pariwisata untuk melaksanakan promosi, pemasaran dan pengembangan pariwisata.			
	Kepariwisata Kota Pangkalpinang yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kota Pangkalpinang 		
	Misi 3 : Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga serta mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga.			
	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan di bidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	
2.	Dinas Pariwisata, Seni dan Olahraga Kabupaten Bangka			
	Misi 1: Pemanfaatan potensi pariwisata yang dapat meningkatkan perandalam kesejahteraan masyarakatserta mampu meningkatkan pendapatandaerah.		<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumenperencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran 	
	Misi 2: Pengembangan kawasan wisata untuk mendukung pemerataanpembangunan di seluruh wilayah kabupaten Bangka sesuai denganpotensi masing - masing wilayah.			
	Misi 3: Mengembangkan produk – produk pariwisata secara seksama agar tetap terjaga otentitasnya (keasliannya), berbasisnya karakteristik lokal danberbasis masyarakat dengan tetap berorientasi kepada pasar.			
	Misi 4: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembanganpariwisata.			
	Misi 5: Menggali, menjaga, mengembangkan dan melestrikan kekayaanAdat			

	Istiadat, Budaya dan lingkungan			
	Misi 6: Mengembangkan kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang pariwisata agar dapat mewujudkan Kabupaten Bangka Sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka.			
	Misi 7: Meyadarkan masyarakat serta sekolah pelaku pariwisata bahwa masing-masing pihak memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan Pariwisata.			
	Misi 8: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan Kebudayaan agar upaya dimanfaatkan.			
	Misi 9: Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku Pariwisata pada khususnya bahwa pariwisata dapat mengantarkan kondisi yang lebih baik pada aspek Kamtibmas, pengamalan ajaran dan Pancasila serta mewujudkan otonomi daerah dengan melaksanakan pendidikan kesehatan serta aksesibilitas			

	sebagai pendorong dan penggerak pembangunan.			
	Misi 10: Mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak dibidang pariwisata dalam negeri maupun dari luar negeri.			
	Misi 11: Mengembangkan kerjasama daerah dengan lain untuk melaksanakan promosi dan pengembangan pariwisata			
3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat			
	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
		Berkembangnya destinasi wisata		
4.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangka Tengah			
5.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan			
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
	Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang optimal di bidang Pariwisata,	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi		

	Kepemudaan dan Olahraga agar pembinaan berorientasi pada prestasi kerja dan daya saing		antara provinsi dan kab/kota	
	Meningkatnya upaya pelestarian dan penggalian nilai-nilai seni, budaya Lokal dan sejarah tradisional agar apresiasi masyarakat terhadap kearifan budaya lokal terwujud dan menumbuhkan ekonomi kreatif	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan local dengan bertumbuhnya Ekonomi Kreatif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat		
	Meningkatnya produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata agar berkembang kepariwisataan di Kabupaten Bangka Selatan	Berkembangnya kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan		
6.	Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung			
	Misi ke-1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata			
	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD yang akuntabel	Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">• Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota• Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota	<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota• Terbatasnya Anggaran
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD		
	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional	Meningkatnya tata kelola aparatur		
	Mewujudkan infrastruktur yang handal dan ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pertanahan daerah		
	Misi ke-2: Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan meningkatkan pemasaran pariwisata			

	Mewujudkan kepariwisataan daerah yang handal	Terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
	Misi ke-3: Meningkatkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
	Mewujudkan pengelolaan sumber daya ekonomi kreatif untuk pengembangan pariwisata daerah	Terwujudnya pengelolaan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitang Timur			
	Misi 1: Mengembangkan sumber daya manusia baik aparatur, pelaku wisata, pelaku usaha budaya dan pariwisata yang profesional, kreatif dan berinovasi secara terpadu dan berkelanjutan.		<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya dokumen perencanaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota • Belum terintegrasinya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara provinsi dan kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya koordinasi dengan Kab/kota • Terbatasnya Anggaran
	Misi 2: Penggalan dan pengembangan potensi-potensi budaya dan pariwisata serta sumber daya alam yang ada secara terpadu dan berkelanjutan			

	Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana budaya dan pariwisata daerah.			
	Misi 4: Melaksanakan promosi Pariwisata Daerah ketingkat Nasional dan Internasional yang mendukung pembangunan ekonomi daerah dan dukungan terhadap industri.			

Tabel 3.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran pada Renstra PD kabupaten/Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	69.52%	Sesuai	Sesuai
2	Persentase sarana prasarana di Destinasi Pariwisata yang memenuhi	100.00%	Sesuai	Sesuai
3	Persentase kunjungan wisatawan	553,752	Sesuai	Sesuai
		10,554	Sesuai	Sesuai
4	Persentase sumber daya pariwisata yang berkualitas	11.66%	Sesuai	Sesuai
	Persentase kelembagaan Kepariwisataan yang berkualitas	100.00%	Sesuai	Sesuai

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik factor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
7. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- 1) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- 2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dalam konteks **“Clean Governance”** yang **pro-poor, progrowth dan pro-job**, serta **pro - enviro**ntment sebagai triple track yang menganut 8 prinsip dasar dalam pelayanan public yaitu:

- (1) asas kepastian hukum;
- (2) keseimbangan;
- (3) ketidakberpihakan;
- (4) kecermatan;
- (5) tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan;
- (6) keterbukaan;
- (7) profesionalitas;
- (8) kepentingan umum.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata dan budaya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dijelaskan bahwa isu-isu strategis mengenai permasalahan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung, khusus urusan kebudayaan dan pariwisata antaralain:

- 1) Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
- 3) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
- 4) Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata;
- 5) Belum optimalnya pelestarian budaya lokal yang diarahkan pada pembangunan sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa;
- 6) masih lemahnya kualitas dan kapasitas, pengembangan dan inovasi, promosi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan serta kemampuan tata kelola dalam pelestarian kebudayaan;

- 7) Masih lemahnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya budaya yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi, rendahnya pengembangan kreasi dan produksi industri budaya, lemahnya institusi budaya, lemahnya institusi dan pranata yang kondusif, serta lemahnya akses dan manajemen permodalan dalam rangka pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal.

Sedangkan isu - isu strategis di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain:

1. Urusan Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, hal tersebut dikarenakan masih perlunya dikembangkan budaya lokal seperti atraksi seni dan budaya. Sehingga isu strategis bidang kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
2. Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
3. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

2. Urusan Pariwisata

Berdasarkan identifikasi permasalahan pariwisata maka isu-isu strategis urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya Infrastruktur, sarana, prasarana dan peran serta pemangku kepentingan pariwisata daerah.
- b. Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang terintegrasi.
- c. Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Pariwisata.

Tabel 3.5

Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kab/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memilik daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahanya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
		100

Tabel 3.6
 Nilai Skala Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
 Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	dst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang terintegrasi								
1.	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	20	10	20	10	-	-	-	60
2.	Rendahnya kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata	20	10	20	10	15	-	-	75
	Belum optimalnya Infrastruktur, sarana, prasarana dan peran serta pemangku kepentingan pariwisata daerah.								
3.	Kurangnya kualitas dan kuantitassarana prasarana dan fasilitas umum di destinasi pariwisata	20	10	20	10	15	25	-	100
	Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Pariwisata								
4.	Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata	20	10	20	10	15	25	-	100
5.	Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata	20	10	20	10	-	-	-	60
	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal.								
6.	Kurangnya kualitas SDM Kebudayaan	20	10	20	10	15	-	-	75
7.	Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya	20	10	20	10	-	-	-	60

Guna menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rata – Rata Skor Isu-isu Strategis
Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata – Rata Skor
1	2	3	4
1.	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	60	
2.	Rendahnya kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata	75	
3.	Kurangnya kualitas dan kuantitassarana prasarana dan fasilitas umum di destinasi pariwisata	100	
4.	Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata	100	
5.	Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata	60	
6.	Kurangnya kualitas SDM Kebudayaan	75	
7.	Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya	60	

Mengacu kepada isu-isu strategis tersebut, maka dalam upaya melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait isu-isu strategis tersebut aparatur Disbudpar harus berkemampuan tinggi dan profesional, terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap mendukung dan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki visi dan misi tersendiri yang berbeda dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berpedoman pada Visi RPJMD dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk memenuhi Misi ke-1 pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang diperlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan denganberpedoman pada isu-isu strategis.Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searahdengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yangakan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Tujuan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan adalah **MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN BERBASIS BUDAYA LOKAL.**

4.1.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu:

1. Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar.
3. Meningkatnya kunjungan pariwisata.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas.
5. Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berbasis budaya lokal	Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	17.29%	29.37%	42.38%	55.39%	69.52%
2.		Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Persentase sarana prasarana di Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	18.52%	44.44%	70.37%	96.30%	100.00%
3.		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan	392,292	427,598	466,082	508,030	553,752
				7,758	8,378	9,049	9,772	10,554
4.		Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas	Persentase sumber daya pariwisata yang berkualitas	4.29%	8.44%	10.46%	11.16%	11.66%
		Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Persentase kelembagaan Kepariwisataan yang berkualitas	83.33%	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022

5.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.2.1 Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan analisa akar Masalah, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata.
2. Peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.
3. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata
4. Peningkatan pelestarian budaya lokal

1.2.2 Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengambil strategi dan memunculkan kebijakan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran organisasi, maka kebijakan yang akan diambil yaitu:

1. Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya.
2. Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi.
3. Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan professional.
4. Peningkatan infrastruktur , sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berbasis budaya lokal	Meningkatnya budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung sektor pariwisata	Peningkatan pelestarian budaya lokal	Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya
2.		Meningkatnya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata yang memenuhi standar	Peningkatan kualitas daya tarik wisata, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata	Peningkatan infrastruktur , sarana dan prasarana pengembangan destinasi pariwisata
3.		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata terintegrasi
4.		Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata yang berkualitas	Pengembangan uji kompetensi bagi sumber daya pariwisata	Peningkatan kuantitas Sumber Daya Pariwisata yang kompeten dan professional
		Meningkatnya jumlah kelembagaan pariwisata yang berkualitas		

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Program Pelestarian Budaya
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

5.2 KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Program Pelestarian Budaya Daerah

1. Kegiatan Kajian Tradisi Bangka Belitung
2. Kegiatan Penulisan Sejarah Bangka Belitung
3. Kegiatan Pengembangan Data Pokok Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung

4. Kegiatan Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
5. Kegiatan Partisipasi dan Penghargaan Serta Kerjasama Di Bidang Budaya
6. Kegiatan Pelatihan Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
7. Kegiatan Pagelaran Pameran Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung
8. Kegiatan Seminar Revitalisasi Dan Reaktualisasi Sejarah Dan Tradisi Bangka Belitung
9. Kegiatan Gita Bahana Dan Aubade Kemerdekaan RI
10. Kegiatan Lawatan Sejarah Dan Kemah Budaya
11. Kegiatan Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Cagar Budaya Dan Museum Daerah
12. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya
13. Kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi Koleksi Museum Daerah
14. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya Dan Permuseuman
15. Kegiatan Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung
16. Kegiatan Perintisan Museum Provinsi
17. Kegiatan Kajian Cagar Budaya Bangka Belitung
18. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah
19. Kegiatan Pengiriman Misi Kesenian Daerah
20. Kegiatan Pelaksanaan Workshop Kesenian Daerah
21. Kegiatan Pentas Seni Budaya
22. Kegiatan Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai
23. Kegiatan Bantuan Sarana Dan Prasarana Sanggar Seni Tradisional
24. Kegiatan Pelaksanaan Dialog Budaya
25. Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Lagu Daerah
26. Kegiatan Pengembangan Seni Kriya Tradisional

27. Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Seni Tradisi (Perekaman Digitalisasi & Penulisan Naskah)
28. Kegiatan Festival Budaya Melayu

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung
2. Kegiatan Pelayanan Informasi Pariwisata
3. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung
4. Kegiatan Pembuatan Bahan Publikasi
5. Kegiatan Publikasi Pariwisata
6. Kegiatan Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung
7. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
8. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung
9. Kegiatan Partisipasi Event Promosi Pariwisata
10. Kegiatan Pelaksanaan Fam Trip
11. Kegiatan Pelaksanaan Tour de Babel
12. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media
13. Kegiatan Roadshow Stakeholder Pariwisata
14. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri
15. Kegiatan Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung
16. Kegiatan Babel Tourism Run
17. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Geowisata
18. Kegiatan Pengembangan Promosi Wisata Edukatif, Kreatif dan Minat Khusus Bahari
19. Kegiatan Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus
20. Kegiatan Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah
21. Kegiatan Penyusunan Buku Pariwisata Daerah

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung
2. Kegiatan Pengembangan kawasan pariwisata provinsi

3. Kegiatan Penyusunan paket wisata
4. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata
5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat
6. Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya
7. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
8. Kegiatan Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata
9. Kegiatan Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung
10. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK
11. Kegiatan Sosialisasi Paket Wisata Geowisata di Pulau Belitung
12. Kegiatan Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung
13. Kegiatan Penyusunan Interpretasi Berbasis Ekowisata Bahari di Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Belitung

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Kegiatan Pengembangan Industri Perfilman, Animasi, Video dan Fotografi
2. Kegiatan Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya
3. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Kepariwisataan
4. Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata
5. Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi bagi Sumber daya pariwisata
6. Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi lanjutan bagi Sumber Daya Pariwisata

7. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Sistem Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata dengan Asosiasi Profesi dan LSP
8. Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan putra - putri kepariwisataan provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kegiatan Penyelenggaraan Lokakarya Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Pariwisata
10. Kegiatan Penerapan Sistem Magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan
11. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil sertifikasi bagi sumber daya pariwisata
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner
13. Kegiatan Pengembangan Industri Perfilman, animasi , Video dan fotografi
14. Kegiatan Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
15. Kegiatan Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya
16. Kegiatan Pengembangan Ekonomi kreatif berbasis media, aplikasi dan pengembangan permainan
17. Kegiatan Pengembangan Desain dan Arsitektur
18. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sentra Inovasi dan Pusat Kreatif
19. Kegiatan Pengembangan Cenderamata khas Kepulauan Bangka Belitung
20. Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas pengelolaan kelembagaan kepariwisataan
21. Kegiatan Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah
22. Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan daerah
23. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Lintas Sektor Pariwisata
24. Kegiatan Kajian Peran Kelembagaan Pelaku Pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan

25. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan kepariwisataan
26. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif
27. Kegiatan Partisipasi Event Festival Nusantara

5. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang
- b) Kegiatan Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung

5.3. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu 2017-2022 dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Kepulauan Bangka Belitung. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017-2022. Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Budaya Daerah

Indikator : Persentase budaya Lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina.

Sedangkan kegiatan dapat dilihat dalam deskripsi singkat dibawah ini :

- a) Kegiatan Kajian Tradisi Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah naskah kajian tradisi

- Jumlah kebijakan pengelolaan budaya lokal yang disusun
- Kelompok Sasaran : Komunitas Budaya, Desa Adat, Stakeholder Kebudayaan

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b) Kegiatan Gita Bahana Dan Aubade Kemerdekaan RI

Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta gita bahana dan aubade
- Jumlah event budaya dan fasilitasi event daerah, dan nasional

Kelompok Sasaran : Pelajar/Mahasiswa

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Kegiatan Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Cagar Budaya Dan Museum Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah sarana dan prasarana cagar budaya dan museum daerah
- Tertatanya pengembangan kawasan cagar budaya dan museum
- Jumlah koleksi dan naskah kuno yang dikelola (Koleksi)

Kelompok Sasaran : SDM Kebudayaan, Pengelola Museum, Wisatawan/Pelajar/masyarakat umum dan Swasta serta Stakeholder kebudayaan

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator Kinerja :

- Jumlah Cagar Budaya yang dikelola (Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs CagarBudaya, Kawasan Cagar Budaya)
- Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan
- Jumlah pengelolaan terpadu cagar budaya.
- Jumlah BCB/Situs/Kawasan yang diinventaris dan ditetapkan.

- Jumlah cagar budaya daerah yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan nasional.
- Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya

Kelompok Sasaran : Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten / Kota, Pemerintah Kabupaten / Kota, SDM Kebudayaan dan Stakeholder Kebudayaan.

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e) Kegiatan Seminar Revitalisasi Dan Reaktualisasi Sejarah Dan Tradisi Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta yang memahami budaya daerah
- Jumlah seminar/workshop revitalisasi budaya daerah
- Jumlah seminar/workshop reaktualisasi budaya daerah

Kelompok Sasaran : Stakeholder Kebudayaan

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- f) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba dan pawai (kali) (pertunjukan, pameran seni, festival, lomba, pawai budaya sanggar/organisasi)

Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum, Komunitas Budaya, Pelaku Seni dan Budaya serta Pemerintah

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- g) Kegiatan Pengiriman Misi Kesenian Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba dan pawai (kali) (pertunjukan, pameran seni, festival, lomba, pawai budayasanggar/organisasi)
- Jumlah event budaya yang diselenggarakan

Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum, Komunitas Budaya, Sanggar seni, Pelaku Seni dan Budaya serta Pemerintah

Pagu Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator : Persentase Tingkat Kunjungan Wisatawan

Untuk Kegiatan dapat dideskripsikan seperti dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata daerah di media cetak (media)
- Jumlah publikasi dan pencitraan di media elektronik dan digital (media)
- Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata pariwisata daerah di media ruang (media)
- Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (ribu eksemplar) (Master, Leaflet, Booklet)
- Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping) (Master, Keping)
- Jumlah peningkatan kerjasama dan kemitraan pencitraan pariwisata (naskah)

Kelompok Sasaran : Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Indikator Kinerja :

- Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (kegiatan)
- Jumlah partisipasi pada even pariwisata berskala nasional (kegiatan)
- Jumlah pendukung even seni, budaya dan pariwisata daerah (kegiatan)
- Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah dipasar dalam negeri (transaksi)

- Aktivasi Pusat Informasi Kepariwisata (Tourism Information Centre) (unit) dan Anjungan Informasi mandiri (AIM)
- Jumlah penyelenggaraan even pariwisata daerah (unit)

Kelompok Sasaran :

1. Calon Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
2. Biro Perjalanan Wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Kegiatan Publikasi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah promotion di media – media (kegiatan)
- Jumlah partisipasi pada even pariwisata berskala lokal, nasional dan internasional (kegiatan)

Kelompok Sasaran :

- a. Calon Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Biro Perjalanan Wisata
- c. Media Cetak dan Elektronik

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d) Kegiatan Dukungan Event Promosi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah dukungan event pariwisata (kegiatan)
- Jumlah partisipasi pada even pariwisata berskala lokal, nasional dan internasional (kegiatan)

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d. Kegiatan Pelaksanaan Fam Trip

Indikator Kinerja :

- Jumlah peserta Familiarization Trip (Widyawisata Pengenalan) (peserta)
- Jumlah newsletter pariwisata Bangka Belitung (eksemplar)
- Jumlah pengembangan hubungan lembaga pariwisata (naskah) (VITO)
- Jumlah pengembangan informasi pasar dalam daerah (naskah)
- Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri (naskah)

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Indikator : Presentase objek wisata yang terkelola

- a) Kegiatan Fasilitas sarana pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah dan lokasi wisata alam dan bahari
- Jumlah wisata budaya yang dikembangkan

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata
- d. Pengelola objek wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b) Kegiatan Pengembangan kawasan pariwisata provinsi

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitas pengembangan daya tarik wisata
- Jumlah daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi

Kelompok Sasaran :

- a. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
- b. Pemerintah Kabupaten / Kota
- c. Stakeholder Pariwisata
- d. Pengelola daya tarik wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata (orang)
- Jumlah Pokdarwis
- Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan (orang)

Kelompok Sasaran :

- 1. Masyarakat disekitar Destinasi Pariwisata
- 2. Pelajar/mahasiswa
- 3. Stekholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d) Kegiatan Penyusunan paket wisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen paket wisata perjalanan
- Jumlah Jenis dan Paket Wisata Unggulan yang dikembangkan

Kelompok Sasaran :

- 1. Pelaku Wisata
- 2. SDM Pariwisata
- 3. Pemerintah Kab/Kota
- 4. Stekholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata
- Jumlah daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi

Kelompok Sasaran :

1. Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
2. Pemerintah Kabupaten / Kota
3. Stakeholder Pariwisata
4. Pengelola daya tarik wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- f) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Rencana Detail Kawasan Strategis Muntok dan sekitarnya

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen Rencana Induk Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata
- Jumlah daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan

Kelompok Sasaran :

1. Pemerintah Kabupaten / Kota
2. Stakeholder Pariwisata
3. Pengelola daya tarik wisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan

Indikator :

1. persentase sumber daya pariwisata yang dilatih dan disertifikasi
2. Presentase pelaku industri ekonomi kreatif yang terlatih
3. Pertumbuhan lembaga pariwisata yang difasilitasi

Sedangkan penjabaran kegiatan dapat dilihat dalam deskripsi dibawah ini :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dilatih

Kelompok Sasaran :

1. Stakeholder Pariwisata
2. Kelompok usaha pariwisata dan budaya
3. Masyarakat / Pelajar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b) Kegiatan Penyelenggaraan sertifikasi bagi Sumber daya pariwisata

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang diuji kompetensi

Kelompok Sasaran :

1. Stakeholder Pariwisata
2. Kelompok usaha pariwisata dan budaya
3. Masyarakat / Pelajar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c) Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan putra - putri kepariwisataan provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja :

- Jumlah Putra Putri Pariwisata yang mengikuti event nasional dan internasional

Kelompok Sasaran :

1. Masyarakat / Pelajar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- d) Kegiatan Kerjasama pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP

Indikator Kinerja :

- Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan Pariwisata

Kelompok Sasaran :

1. Lembaga Kepariwisata
2. Pelaku Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e) Kegiatan Pengembangan Industri Perfilman, animasi , Video dan fotografi

Indikator Kinerja :

- Jumlah pelaku ekonomi kreatif
- Jumlah pengembangan ruang kreatif

Kelompok Sasaran :

1. Pelaku ekonomi kreatif
2. Stakeholder Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Indikator :

1. Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan
2. Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan indikator kegiatan dapat dideskripsikan dibawah ini :

- a) Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja :

- Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- c) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja :

- Jumlah Dokumen perencanaan anggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja :

- Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata (KEK Tanjung Kelayang

Indikator Kinerja :

- Jumlah pelaporan dan evaluasi yang disusun

Kelompok Sasaran :

Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Tahun Awal 2017		2018		2019		2020		2021		2022		Total Akhir
			Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	2018 - 2022
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		2,125,758,500											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	24,600,000											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	205,989,963											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		4 kend	236,480,000											
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 bulan	124,930,000											
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	30,000,000											
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor		12 bulan	92,800,000											
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	59,781,500											

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	55,000,000										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	15,940,000										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	5,700,000										
	Penyediaan Makanan dan Minuman		12 bulan	117,200,000										
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 bulan	419,766,037										
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 orang	400,490,000										
	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah		7 kab/kota	200,000,000										
	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1 kawasan	137,081,000										
II	Program Peningkatan Sarana dan	Meningkatnya sarana		398,641,000										

	Prasarana Aparatur	dan prasarana aparatur													
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		3 pkt (WT, Fingerprint, dan Printer)	105,071,000											
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2671 m2	216,270,000											
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		12 bulan	77,300,000											
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan kualitas kerja pegawai		7,000,000											
	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu		14 stel	7,000,000											
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100,888,000											
	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS		10 orang	100,888,000											

	Daerah														
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan		240,615,000											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	182,265,000											
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		5 dokumen	58,350,000											
VI	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan		4,610,678,500											
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		10 event	1,437,040,000											
	pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan		35 orang	143,898,000											
	peningkatan pelestarian tradisi		5 dokumen	353,011,000											
	penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian)		24 event	1,053,546,000											
	pembinaan kesenian dan perfilman		1 festival	640,911,000											

	pendukung pengembang an keragaman budaya		122 pentas	982,272,5 00											
V II	Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan		4,166,89 0,200											
	<i>Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata bangka belitung dan sumatera</i>		2 websit e	142,465,0 00											
	<i>pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri</i>		4 event	600,092,0 00											
	<i>pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri)Dukungan Event Promosi)</i>		9 event	1,438,305 ,000											
	<i>Pengembang an Pasar Pariwisata (Farm Trip)</i>		10 tour operat or, pers tour, photog rafer & jurnali s	277,257,2 00											
	<i>Pengembang an Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC)</i>		2 TIC	370,446,0 00											
	<i>Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan</i>		6 media	638,325,0 00											

	Bangka Belitung (Bahan Promosi)														
	Pengadaan TIC Mobile di Pulau Bangka dan Belitung (2 Unit)		2 unit	400,000,000											
	Sosialisasi Aplikasi Promosi Pariwisata		1 kegiatan	300,000,000											
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan													
	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung				6	485,899,000	6	716,600,000	6	788,200,000	6	867,000,000	6	953,795,000	3,977,050,000
	Pelayanan Informasi Pariwisata				4	120,990,000	4	133,661,000	4	140,344,000	4	147,362,000	4	154,700,000	703,364,000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung				2	118,920,000	2	200,000,000	2	210,000,000	2	230,000,000	2	240,000,000	1,147,012,000
	Pembuatan Bahan Publikasi				0	-	1	56,700,000	1	59,535,000	1	62,511,000	1	65,637,000	244,383,000
	Publikasi Pariwisata				0	-	5	250,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	400,000,000	1,300,000,000
	Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung				0	-	1	149,112,000	1	156,568,000	1	164,396,000	1	172,616,000	784,704,000
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam Negeri				4	245,630,000	4	260,947,000	4	273,994,000	4	287,694,000	4	302,000,000	1,373,156,000

	Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung				0	-	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	348,075,000
	Dukungan Event Promosi Pariwisata				15	2,436,415,000	50	5,503,725,000	50	5,778,911,000	50	6,067,800,000	50	6,371,200,000	28,876,312,000
	Pelaksanaan Fam Trip				0	-	1	223,668,000	1	234,852,000	1	246,594,000	1	258,924,000	1,177,056,000
	Pelaksanaan Tour d' Bangka Belitung Island				0	-	1	945,000,000	1	992,250,000	1	1,041,800,000	1	1,093,900,000	4,972,950,000
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui Media				5	286,670,000	5	486,143,000	5	510,450,000	5	535,900,000	5	562,700,000	2,558,187,000
	Roadshow Stakeholder Pariwisata				0	-	5	583,000,000	5	641,300,000	5	705,430,000	5	775,973,000	2,705,703,000
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri				0	-	2	600,000,000	2	660,000,000	2	726,000,000	2	733,000,000	2,719,000,000
	Penyusunan Profil Pasar Pariwisata Bangka Belitung				0	-	1	288,750,000	1	303,187,000	1	313,346,000	1	334,264,000	1,239,547,000
	Babel Tourism Run				0	-	1	735,000,000	1	771,750,000	1	810,337,000	1	850,854,000	3,867,941,000
	Pelaksanaan Promosi Geowisata				0	-	1	288,750,000	1	303,187,000	1	313,346,000	1	334,264,000	1,239,547,000
	Pengembangan Promosi Wisata Edukatif, Kreatif, dan Minat Khusus Bahari				0	-	1	288,750,000	1	303,187,000	1	313,346,000	1	334,264,000	1,239,547,000
	Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus				0	-	1	288,750,000	1	303,187,000	1	313,346,000	1	334,264,000	1,239,547,000
	Penyusunan				225	147,252,00	250	222,373,0	275	2,446,111,	300	269,000,00	325	295,900,00	

	Buku Pariwisata Daerah				buku	0		00		000		0		0	3,435,542,000
	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah				150 buku	336,622,000	200	418,447,000	250	439,369,000	300	461,337,000	325	484,400,000	2,202,074,000
V II I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			0											
	Pengembangan dan Pemahaman atas kekayaan Budaya Daerah		70 orang	0											
	Pengelolaan Peninggalan Purbakala		1 Cagar Budaya	77,443,000											
	Pengembangan kerjasama Budaya (Drumkorp Serumpun Sebalai)		38 orang	199,000,000											
	Penyusunan Sasra Lisan Melayu Bangka Belitung		350 buku	77,345,000											
I X	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			2,764,437,625											
	Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung)		86 pelaku usaha	81,081,170											
	Pengadaan sarana pendukung objek Wisata		0	0											
	Pemberdayaan Masyarakat di		4 kegiatan	1,098,068,055											

	Destinasi Pariwisata		an												
	Perlombaan Usaha Wisata Kuliner		50 pelaku usaha	135,288,4 00											
	Penyusunan Paket Wisata Destinasi Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		162 pelaku pariwi sata dan dok kesepa katan	350,000,0 00											
	Pengadaan pemasangan Lampu taman 50 Titik di daya tarik wisata (DTW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)		50 titik	200,000,0 00											
	penyusunan kalender Event Pariwisata dan Budaya		1 paket buku	200,000,0 00											
	Kajian dan Survei Geopark Pulau Bangka dan Study Observasi Marine Park		2 kawas an	700,000,0 00											
	Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata	Persent ase daya tarik wisata provins i yang terkelol a													
	Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung			200,000,0 00	0	-	1	157,500,0 00	1	165,375,00 0	1	173,643,00 0	1	182,325,00 0	678,843,000

	penyusunan paket wisata				0	-	1	157,500,000	-	-	1	190,575,000	-	-	348,075,000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata				1	92,118,000	1	149,112,600	2	156,568,000	2	164,396,000	2	172,616,000	784,704,600
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat				1	171,,877,000	-	-	-	-	-	-	-	-	177,515,000
	Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya				1	617,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	710,060,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata				4	117,885,000	5	189,654,000	5	199,136,000	5	209,093,000	5	219,548,000	998,054,000
	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Destinasi Pariwisata				5	2,506,547,000	10	4,177,324,000	10	4,386,190,000	10	4,605,400,000	14	4,835,774,000	21,983,092,000
	Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata				10	148,118,000	14	220,000,000	14	231,000,000	14	242,550,000	14	254,677,500	1,148,227,500
	Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung				1	327,312,000	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000,000
	Kegiatan Sosialisasi Paket Wisata Geowisata di Pulau Belitung				0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Interpretasi berbasis				0	0	1	275.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	425.000.000	

	Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung														
	Kegiatan Penyusunan Interpretasi berbasis Ekowisata Bahari di Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau – Pulau Kecil Belitung				0	0	1	275.000,00	1	350.000,00	1	400.000,00	1	425.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan				3 kawasan	103,120,00	3 kaw	194,987,00	3 kaw	204,735,00	3 kaw	214,975,00	3 kawasan	225,723,75	1,026,122,750
X	Program Pengembangan Kemitraan			434,799,275											
	Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)		120 orang	434,799,275											
X I	Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya			480,326,000											
	Peningkatan Pembangunan karakter dan Budi Pekerti Bangsa		156 siswa aubade dan GBN	480,326,000											
X II	Program Peningkatan	Persentase													

	Pelayanan Pemerintah	pelayanan administrasi pelayanan pemerintah													
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	1,975,115,000	100%	2,578,081,000	100%	2,835,889,100	100%	3,119,478,010	100%	3,431,425,811	14,308,583,921
	Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan				6 dok	292,809,000	5 dok	406,148,000	5 dok	426,450,000	5 dok	447,700,000	5 dok	470,167,000	2,137,273,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	613,500,000	100%	1,358,130,000	100%	1,426,000,000	100%	1,497,300,000	100%	1,572,200,000	7,147,088,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran				6 dok	218.687.000	6 dok	240,555,700	6 dok	264,611,000	6 dok	291,072,000	6 dok	320,179,600	1,335,106,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10 orang	70,360,000	10 org	128,609,000	15 org	147,900,000	17 org	170,000,000	20 org	195,500,000	753,843,000
	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat musik Rampak Gendang				60 unit	487,565,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung				12 bulan	442,900,000	12 bln	600,000,000	12 bln	650,000,000	12 bln	700,000,000	12 bln	750,000,000	3,142,900,000
X II I	Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikemb													

		Anggaran, dimanfaatkan dan dibina													
	Kajian Tradisi Bangka Belitung				1	90,533,000	1	200,000,000	1	240,000,000	1	280,000,000	1	300,000,000	1,110,533,000
	Penulisan Sejarah Bangka Belitung				1	212,131,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	280,000,000	1	295,000,000	1,312,131,000
	Pengembangan Data Pokok Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung				80	53,255,000	80	75,000,000	80	80,000,000	80	85,000,000	80	90,000,000	383,255,000
	Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung				422	110,059,500	450	150,000,000	450	160,000,000	500	200,000,000	500	225,000,000	845,059,500
	Pemberian dukungan dan penghargaan serta kerjasama di bidang budaya				35	5,523,673,000	35	5,799,856,600	35	6,089,849,000	35	6,394,341,000	35	6,714,059,000	30,521,778,600
	Pelatihan sejarah dan tradisi Bangka Belitung				0	0	50	200,000,000	50	210,000,000	50	220,500,000	50	231,525,000	862,025,000
	Pagelaran pameran sejarah dan tradisi Bangka Belitung				6	97,633,000	6	120,000,000	6	125,000,000	6	130,000,000	6	140,000,000	612,633,000
	Seminar Revitalisasi dan reaktualisasi sejarah dan tradisi Bangka Belitung				0	0	200	450,000,000	0	0	200	500,000,000	0	0	950,000,000
	Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI				256	416,140,000	300	436,947,000	300	458,794,000	350	481,734,000	350	505,820,000	2,299,435,000
	Lawatan Sejarah dan				200	0	200	450,000,000	0	0	200	500,000,000	0	0	950,000,000

	kemah budaya														
	Fasilitasi sarana dan prasarana cagar budaya dan museum daerah				0	0	0	0	2	200,000,00 0	0	0	0	0	200,000,000
	Pengelolaan cagar budaya				1	84,765,000	1	89,000,00 0	1	93,453,000	1	98,126,000	1	103,032,00 0	468,376,000
	Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah				1	142,012,00 0	1	150,000,0 00	0	0	0	0	1	200,000,00 0	492,012,000
	Pelatihan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman				0	0	0	0	25	300,000,00 0	0	0	0	0	300,000,000
	Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung				50	106,509,00 0	50	200,000,0 00	0	0	50	225,000,00 0	0	0	531,509,000
	Perintisan Museum Provinsi				0	0	0	0	0	0	0	0	1	200,000,00 0	200,000,000
	Kajian Cagar Budaya Bangka Belitung				0	0	0	0	0	0	1	250,000,00 0	0	0	250,000,000
	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah				0	0	0	682,500,0 00	1	716,625,00 0	1	754,456,00 0	0	790,079,00 0	2,943,660,0 00
	Pengiriman Misi Kesenian Daerah				0	0	2	386,460,0 00	2	405,752,00 0	2	426,040,00 0	2	447,342,00 0	1,665,594,0 00
	Pelaksanaan Workshop kesenian daerah				2	0	2	315,000,0 00	2	325,000,00 0	2	335,000,00 0	2	345,000,00 0	1,320,000,0 00
	Pentas Seni Budaya				35	269,281,50 0	35	282,745,5 00	35	296,882,00 0	35	311,726,90 0	35	327,313,00 0	1,487,948,9 00
	Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai				60	427,974,00 0	60	449,372,0 00	60	471,841,00 0	60	495,433,00 0	60	520,205,00 0	2,364,825,0 00
	Bantuan				14	0	14	315,000,0	14	325,000,00	14	335,000,00	14	345,000,00	1,320,000,0

	Sarana dan prasarana Seni Tradisional						00		0		0		0	00
	Pelaksanaan Dialog Budaya			2	0	0	0	1	350,000,000	0	0	1	400,000,000	750,000,000
	Penyelenggara n Perlindungan dan Pengembanga n Lagu Daerah			20	0	20	150,000,000	20	160,000,000	20	170,000,000	20	180,000,000	660,000,000
	Pengembanga n Seni Kriya Tradisional			5	0	5	125,000,000	5	145,000,000	5	165,000,000	5	185,000,000	620,000,000
	Penyelengaraa n Perlindungan Seni Tradisi (Perekaman Digitalisasi & Penulisan Naskah)			5	0	54	250,000,000	5	260,000,000	5	270,000,000	5	280,000,000	1,060,000,000
	Festival Budaya Melayu			1	950,000,000	1	997,500,000	1	1,047,375,000	1	1,099,743,500	1	1,154,730,000	5,249,348,500
XVI	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan kelembangaa n Kepariwisataa n													
	Penyelenggara an Pelatihan Dasar Bagi Sumber Daya Pariwisata					350	1,277,400,000	400	1,405,000,000	450	1,545,600,000	500	1,700,200,000	5,928,200,000
	Penyelenggara an Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata			300	1,178,677,500	300	1,296,545,000	350	1,361,382,000	400	1,429,441,000	450	1,500,913,000	5,588,281,000
	Penyelenggara an sertifikasi Lanjutan bagi Sumber Daya					250	1,665,667,500	300	1,832,200,000	350	2,015,450,000	400	2,217,000,000	7,730,317,500

	Pariwisata														
	Kerjasama Pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP						2	367,500,000	2	404,250,000	2	44,467,500	2	489,142,500	1,305,360,000
	Penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan Bangka Belitung				3	497,042,000	3	632,927,000	3	664,573,000	3	697,802,000	3	732,692,000	2,727,994,000
	Penyelenggaraan Lokakarya pelatihan dan sertifikasi sumber daya pariwisata						1	275,000,000	2	302,500,000	2	331,750,000	2	366,000,000	1,275,250,000
	penerapan sistem magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan						1	440,000,000	2	484,000,000	2	532,400,000	2	585,640,000	2,042,040,000
	pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil sertifikasi bagi sumber daya pariwisata						1	148,610,000	1	163,471,000	1	179,800,000	1	197,799,000	689,680,000
	penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner				1	177,515,000	1	186,390,000	1	195,710,000	2	205,495,000	2	215,770,000	803,365,000
	Pengembangan Industri Perfilman, Animasi, Video dan Fotografi						2	618,313,000	2	680,177,000	2	748,195,000	2	823,000,000	2,869,685,000
	pengembangan seni						1	501,363,000	2	551,499,000	2	606,649,000	2	667,314,000	2,326,825,000

	pertunjukan dan industri music														
	Pengembanga n Seni Rupa dan Seni Kriya						1	361,416,000	1	397,557,000	2	437,313,000	2	481,000,000	1,677,286,000
	Pengembanga n Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Aplikasi dan Pengembanga n Permainan						1	302,500,000	1	332,750,000	1	366,000,000	1	402,627,500	1,403,877,500
	Pengembanga n Desain dan Arsitektur						1	385,000,000	1	423,500,000	1	465,800,000	1	512,435,000	1,786,735,000
	Fasilitasi Pengembanga n Sentra Inovasi dan pusat kreatif						1	611,105,000	1	672,215,500	2	739,437,000	2	813,300,000	2,836,057,500
	Pengembanga n Cenderamata Khas Kepulauan Bangka Belitung						2	495,000,000	2	544,500,000	2	59,895,000	2	658,800,000	1,758,195,000
	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembangaan Kepariwisataa n						1	1,155,945,000	2	1,271,539,000	2	1,398,600,000	2	1,538,500,000	5,364,584,000
	Peningkatan serta kelembagaan dalam pengembanga n pariwisata daerah						1	157,500,000	1	165,375,000	1	173,643,000	1	182,325,000	678,843,000
	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisataa n Daerah				1	177,783,000	1	186,672,000	2	196,000,000	2	205,806,000	2	216,000,000	804,478,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata						1	105,000,000	1	110,250,000	1	115,762,000	1	121,500,000	452,512,000
kajian peran kelembagaan dan pelaku pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan						2	492,200,000	2	541,400,000	2	595,570,000	2	655,127,000	2,284,297,000
pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan kepariwisataan						4	148,600,000	4	163,400,000	4	179,800,000	4	179,700,000	671,500,000
pelatihan pengembangan industri Ekonomi Kreatif				60	710,060,000	72	745,500,000	84	782,841,000	96	821,900,000	108	863,000,000	3,213,241,000
Dukungan Event Festival Nusantara				15	1,500,000,000	15	1,575,000,000	15	1,653,750,000	20	1,736,437,000	20	1,823,000,000	6,788,187,000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
2	Jumlah dokumen Penyusunan paket wisata	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	
3	Jumlah kawasan Daya Tarik Wisata Mangrove yang tertata	NA	1 lokasi	-	-	-	-	
4	Jumlah Dokumen RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya	NA	1 dokumen	-	-	-	-	
5	Jumlah Desa Wisata yang diberdayakan		5 Desa Wisata	5 Desa Wisata	5 Desa Wisata	5 Desa Wisata	5 Desa Wisata	
6	Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi di destinasi pariwisata kabupaten / kota		11Daya Tarik Wisata	10 Daya Tarik Wisata	10 Daya Tarik Wisata	10 Daya Tarik Wisata	14 Daya Tarik Wisata	
7	Jumlah penyusunan paket wisata		2 paket	4 paket	6 paket	8 paket	10 paket	
8	Jumlah naskah kajian tradisi		2 naskah	4 naskah	6 naskah	8 naskah	10 naskah	
9	Jumlah cagar budaya yang dikelola		2 Cagar Budaya	3 cagar budaya	4 cagar budaya	5 cagar budaya	6 Cagar Budaya	

10	Jumlah cetakan dan digitalisasi publikasi koleksi museum daerah		200 buah	400 buah	600 buah	800 buah	1000 buah	
11	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi		20 BCB	40 BCB	60 BCB	80 BCB	100 BCB	
12	Jumlah Festival yang diselenggarakan		2 Festival	3 Festival	4 Festival	5 Festival	6 Festival	
13	Jumlah tim kesenian yang diberangkatkan		2 tim	4 tim	6 tim	8 tim	10 tim	
14	Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung		1 naskah	2 naskah	3 naskah	4 naskah	6 naskah	
15	jumlah sanggar yang dipentaskan		30 pentas	60 pentas	90 pentas	120 pentas	150 pentas	
16	Jumlah personil drum band yang dibina		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
17	Jumlah Data Sejarah dan Tradisi yang dicatat dan validasi		80 data	160 data	320 data	400 data	480 data	
18	Jumlah Karya Cetak, Karya Rekam dan Digitalisasi		1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	
19	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal PinangJumlah penggiat budaya		10 lembaga	20 lembaga	30 lembaga	40 lembaga	50 lembaga	
20	Jumlah event sejarah dan tradisi yang difasilitasi		4 event	8 event	12 event	16 event	20 event	
21	Jumlah peserta gita bahana dan aubade		100 orang	200 orang	300 orang	400 orang	635 orang	
22	Jumlah peserta bimbingan teknis sejarah dan tradisi		40 orang	80 orang	120 orang	160 orang	200 orang	

23	Jumlah apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan tradisi.		80 orang	160 orang	240 orang	320 orang	400 orang	
24	Jumlah peserta lawatan sejarah dan kemah budaya.		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
25	jumlah cagar budaya dan museum daerah yang difasilitasi sarana dan prasarananya.		1 paket	2 paket	3 paket	4 paket	5 paket	
26	jumlah peserta pelatihan		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	
27	Jumlah museum		1 museum	1 museum	1 museum	1 museum	1 museum	
28	jumlah kajian cagar budaya		2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	
29	jumlah workshop yang dilaksanakan		20 orang	40 orang	60 orang	80 orang	100 orang	
30	jumlah sanggar kesenian yang dibantu sarana dan prasarananya		5 sanggar	10 sanggar	15 sanggar	20 sanggar	25 sanggar	
31	Jumlah pelaksanaan dialog budaya		5 event dialog	10 event dialog	15 event dialog	20 event dialog	25 event dialog	
32	jumlah lagu daerah yang dilestarikan		200 orang	400 orang	600 orang	800 orang	1000 orang	
33	Jumlah jenis kriya yang dikembangkan		4 produk	8 produk	12 produk	16 produk	20 produk	
34	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata		5 paket	10 paket	15 paket	20 paket	25 paket	
35	Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung		2 lokasi destinasi	2 lokasi destinasi	2 lokasi destinasi	2 lokasi destinasi	2 lokasi destinasi	

36	Jumlah media informasi yang berbasis IT		1 Media Website	1 Media Website	1 Media Website	1 Media Website	1 Media Website	
37	Tersedianya master publikasi pariwisata		1 Bh Master Publikasi	2 Bh Master Publikasi	3 Bh Master Publikasi	4 Bh Master Publikasi	5 Bh Master Publikasi	
38	Jumlah dokumen kajian pemasaran pariwisata Bangka Belitung		1 Dokumen	0 dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	
39	Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di dalam dan luar daerah		4 event	8 event	12 event	16 event	20 event	
40	Jumlah pendudukan event pariwisata		1 paket	2 paket	3 paket	4 paket	5 paket	
41	Jumlah peserta widyawisata pengenalan destinasi pariwisata		2 keg	4 keg	6 keg	8 keg	10 keg	
42	Jumlah kerjasama dengan media massa		1 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	
43	Jumlah penyelenggaraan tour		0 event	1 event	1 event	1 event	1 event	
44	Jumlah partisipasi pelaku usaha pariwisata		0 event	1 event	1 event	1 event	1 event	
45	Jumlah partisipasi event promosi di luar negeri		0 event	1 event	0 event	1 event	1 event	
46	Jumlah rapat koordinasi pemasaran pariwisata		0 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
47	Jumlah dokumen neraca satelit		225 buku	250 buku	300 buku	325 buku	350 buku	
48	Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata		50 org	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang	

49	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Kepariwisata		3 event	3 event	3 event	3 event	3 event	
50	jumlah penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
61	Jumlah pertemuan Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
62	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
63	Jumlah orang yang terlatih dalam Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif		50 orang	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang	
64	jumlah peserta pelatihan dasar sumber daya pariwisata		100 orang	200 orang	400 orang	600 orang	800 orang	
65	jumlah kegiatan pengembangan seni rupa dan seni kriya		20 pelaku usaha pariwisata	20 pelaku usaha pariwisata	20 pelaku usaha pariwisata	20 pelaku usaha pariwisata	20 pelaku usaha pariwisata	
66	jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan kelembagaan kepariwisataan		5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	
67	Jumlah promosi geowisata yang diselenggarakan		0	1 event	1 event	1 event	1 event	
68	Jumlah promosi wisata edukatif, kreatif dan minat khusus yang diselenggarakan		0	1 event	1 event	1 event	1 event	
69	Jumlah promosi kawasan ekonomi khusus yang di selenggarakan		0	1 event	1 event	1 event	1 event	
70	Jumlah sosialisasi paket wisata Geowisata di Pulau Belitung yang diselenggarakan		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	

71	Jumlah interpretasi berbasis geowisata paket wisata edukatif dan kreatif di Desa Wisata Pulau Belitung yang tersusun dan terbangun		0	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
72	Jumlah interpretasi berbasis ekowisata bahari di Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau – Pulau Kecil Belitung yang tersusun dan terbangun		0	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
73	Jumlah Buku Pariwisata Daerah		1000 buku	2000 buku	3000 buku	4000 buku	5000 buku	

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif. Posisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai institusi Pemerintah Provinsi, pada hakekatnya dominan pada fungsi penyedia dukungan yang mengarah kepada fasilitasi, regulasi, koordinasi, promosi dan memonitoring.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. Rivai
Pembina Utama Madya
Nip. 19600604 198701 1 001